

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan tidak hanya terbatas pada rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Secara umum, kemiskinan diukur berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Garis kemiskinan ini menggambarkan jumlah pengeluaran minimum yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama satu bulan, baik dalam bentuk kebutuhan makanan maupun non-makanan. Seseorang dikategorikan sebagai miskin jika rata-rata pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan tersebut. Namun, pengukuran ini sering kali dianggap belum cukup mencerminkan realitas kemiskinan secara menyeluruh, karena kemiskinan juga mencakup aspek non-ekonomi seperti keterbatasan akses terhadap layanan publik dan infrastruktur dasar.

Berdasarkan laporan BPS pada September 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta jiwa, yang menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Di Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 3,67 juta jiwa, sementara di Kota Depok, angka kemiskinan masih cukup tinggi meskipun belum disebutkan secara spesifik dalam laporan tersebut. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Kota Depok adalah kepadatan penduduk yang tinggi, yang mengakibatkan persaingan dalam mendapatkan

pekerjaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi lebih ketat dibandingkan daerah lain dengan tingkat kepadatan yang lebih rendah. Selain itu, harga kebutuhan pokok di perkotaan seperti Depok cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan, sehingga masyarakat dengan penghasilan rendah lebih rentan mengalami kesulitan ekonomi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah dapat dibagi menjadi dua fokus utama. Pertama, perlindungan sosial dan jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kedua, program pemberdayaan masyarakat, yang berfokus pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok masyarakat agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada bantuan sosial dalam jangka panjang.

Salah satu program yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Depok adalah Program Kartu Depok Sejahtera (KDS), yang dirancang untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu di berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan penerima manfaat dapat lebih mudah mengakses layanan

pendidikan bagi anak-anak mereka, memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, serta mendapatkan dukungan finansial untuk kebutuhan sehari-hari.

Namun, dalam praktiknya, implementasi Program Kartu Depok Sejahtera masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Dilansir dari *nusantara news* yang diunggah pada 24 Oktober 2024, beberapa warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya, sementara sebagian penerima manfaat ternyata tidak memenuhi kriteria sebagai masyarakat miskin. Hal ini terjadi dikarenakan sebagian program ini hanya dirasakan oleh kelompok yang berafiliasi dengan kekuasaan dan tidak ada transparansi mengenai jumlah penerima program yang didukung dari pernyataan salah satu Politisi PDIP menyebut bahwa “Data yang digunakan dalam penyaluran KDS tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Warga miskin yang tidak terdaftar dalam DTKS tidak mendapatkan KDS, meskipun membutuhkan.”(depok.inews.id, 2024).

Penelitian terdahulu terkait dengan topik implementasi program bantuan sosial sudah banyak dilakukan. Diantaranya adalah penelitian Juwona dan Adriyana (2021) menganalisis pelaksanaan program bantuan sosial saat pandemi COVID-19 dengan kerangka *multilevel governance* dan menemukan koordinasi antarlevel pemerintahan belum optimal, mengakibatkan keterlambatan distribusi dan ketidaktepatan sasaran akibat data yang tidak sinkron. Selanjutnya, penelitian oleh Muthiah (2020) mengevaluasi Bantuan Sosial Tunai (BST) selama pandemi dan menemukan program relatif tepat sasaran, namun masih terkendala data usang dan

masalah teknis distribusi. Adapun penelitian oleh Sanjaya (2024) membahas Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) di Kecamatan Ciwidey dan menemukan pelaksanaan sudah sesuai konsep implementasi Grindle, tetapi masih terdapat kendala seperti kurangnya pendampingan usaha, pembekalan daring yang kurang efektif, dan penerima manfaat belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Persamaan dari ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah pembahasan mengenai implementasi program bantuan sosial dan topik mengenai kebijakan publik dalam menganalisis keberhasilan program. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar antara peneliti, yaitu terletak pada cakupan dan konteks penelitian. Penelitian Juwona dan Adriyana (2021) dan Muthiah (2020) mengkaji pembahasan mengenai program bantuan sosial di masa pandemi, sedangkan penelitian Sanjaya (2024) mengkaji pemberdayaan ekonomi keluarga miskin dan kelompok rentan melalui kewirausahaan.

Dengan demikian, kebaruan / novelty dalam penelitian ini terletak pada cakupan analisis yang lebih spesifik terhadap implementasi Program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dengan menggunakan perspektif praktik pekerjaan sosial, hal ini dapat dilihat pada Bab V dimana terdapat usulan program intervensi terkait dengan alternatif solusi dari masalah.

Sebagai acuan penelitian terkait implementasi program, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang di cetuskan oleh Grindle. Menurut Grindle dalam Sanjaya (2024), keberhasilan implementasi suatu program dilihat dari

beberapa faktor, yaitu: (1) proses pelaksanaan program yang sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan; (2) pencapaian tujuan program secara efektif; (3) dampak yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat; dan (4) tingkat perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi pada kelompok sasaran.

Pemilihan Kecamatan Pancoran Mas sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Data dari Dinas Sosial Kota Depok (2024) menunjukkan bahwa terdapat 7.637 bantuan telah disalurkan ke Penerima Manfaat di empat kategori jenis bantuan (santunan kematian, bantuan pangan kota, bantuan siswa miskin tingkat SMA/MA, dan beasiswa pendidikan mahasiswa afirmasi berprestasi) Program Kartu Depok Sejahtera. Kecamatan Pancoran Mas merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat, sehingga jumlah penerima manfaat Program Kartu Depok Sejahtera yang cukup tinggi dibandingkan kecamatan lain di Kota Depok. Selain itu, wilayah ini juga menghadapi berbagai kendala dalam implementasi program.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Pendistribusian Bantuan Sosial Program Kartu Depok Sejahtera Tahun 2024

No	Jenis Bantuan Sosial	Jumlah Penerima Bantuan (orang)
1	Santunan Kematian	2493
2	Bantuan Pangan Kota	2995
3	Bantuan Siswa Miskin Tingkat SMA/MA	1999
4	Beasiswa Pendidikan Mahasiswa Afirmasi Berprestasi	150
<b>Jumlah</b>		<b>7637</b>

Sumber : Dinas Sosial Kota Depok

## 1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Kartu Depok Sejahtera (KDS) di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok”. Untuk memperjelas

fokus masalah tersebut, maka dijabarkan dalam sub-sub permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana proses pelaksanaan Program Kartu Depok Sejahtera di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok?
- 2) Bagaimana pencapaian tujuan Program Kartu Depok Sejahtera di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok?
- 3) Bagaimana dampak Program Kartu Depok Sejahtera di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok?
- 4) Bagaimana peningkatan kualitas hidup/kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Program Kartu Depok Sejahtera di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam mengenai Implementasi Program Kartu Depok Sejahtera di Kecamatan Pancoran Mas Depok, dengan tujuan khusus :

- 1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan Program Kartu Depok Sejahtera di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok
- 2) Untuk mengetahui pencapaian tujuan Program Kartu Depok Sejahtera di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok
- 3) Untuk mengetahui dampak Program Kartu Depok Sejahtera di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok

- 4) Untuk mengetahui peningkatan kualitas hidup/kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Program Kartu Depok Sejahtera di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai implementasi Program Kartu Depok Sejahtera di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, serta dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian berikutnya.

- 2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis, dalam penelitian ini secara praktis, yaitu :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi Program Kartu Depok Sejahtera di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.
- c. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman implementasi Program Kartu Depok Sejahtera yang terselenggara di Kota Depok.
- d. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini menggunakan tatacara dan sistematika berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan
- BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, memuat teori yang relevan dengan penelitian dan alur pikir penelitian
- BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukan data, Teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.
- BAB V USULAN PROGRAM, memuat dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), analisis kelayakan program, serta indikator dan indikator keberhasilan
- BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang kesimpulan dan saran